1) Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(1) Kondisi Umum

a. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam seperti: pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pembinaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), koordinasi pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengendalian dan evaluasi program pembangunan, pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pelaksanaan kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta koordinasi bidang sumber daya alam.

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100

c. Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah mempunyai IKU persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 target 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Capaian kinerja 100 persen ini didukung oleh komitmen pimpinan dan staf Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam.

d. Tabel 8.1 memperlihatkan bahwa IKU persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti untuk capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100 persen sama dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 100 persen. Dari target 7 kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti dapat tercapai sebanyak 7 yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha, Kajian Strategi Literasi Inklusi Keuangan, pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan pelaksanaan kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

(2) Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

  a. Belum ditindaklanjutinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 314 huruf c menyatakan bahwa perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 disahkan (disahkan pada tanggal 12 Januari 2023).

  b. Penyelesaian pengelolaan dana bergulir yang dikelola perangkat daerah terkendala banyaknya piutang macet.

- **Solusi**

  Solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda) di Tahun 2024.
b. Penyelesaian piutang dana bergulir yang dikelola perangkat daerah secara komprehensif.

b) Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Alokasi anggaran urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun 2023 sebesar Rp.285.805.000,00 yang dibagi dalam 1 program, 3 kegiatan, dan 4 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah Rp.284.762.750,00 atau 99,64% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara umum tidak terdapat deviasi fisik, sedangkan deviasi keuangan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran dari pengadaan barang dan/atau jasa. Selanjutnya rincian capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel 8.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target (fisik)	Realisasi (fisik)
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	100
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	100
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	8
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	100
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	5
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	100	100
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	7	7
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1